

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan dalam lingkungan kerja, terutama yang terjadi dalam sistem hierarkis dan budaya korporat yang kaku, sering kali menjadi tema diskursus yang memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Di satu sisi, struktur perusahaan yang ketat dan norma budaya yang kuat dilihat sebagai upaya menjaga disiplin dan efisiensi kerja. Sementara di sisi lain, praktik-praktik tersebut dapat berubah menjadi bentuk penindasan yang melegitimasi ketidakadilan terhadap individu, terutama mereka yang berada di posisi bawahan. Wacana kekerasan di tempat kerja kemudian tidak terlepas dari isu relasi kuasa, tekanan struktural, hingga konflik budaya (Sugimoto, 2014).

Manusia saat ini menampakkan segala aspek kehidupan tidak lepas dari berorganisasi. Selama beberapa dekade, struktur organisasi berdiri secara vertikal, dengan para pemimpin ditempatkan secara hierarkis di atas anggota. Menurut Carson (dalam Nurharmila, 2022), kepemimpinan adalah proses di mana seorang pemimpin memengaruhi pengikutnya dalam tim atau organisasi. Salah satu konsep menarik dalam perilaku organisasi adalah kekuasaan. Kuasa, atau sifat kekuasaan, pada dasarnya berasal dari rasa egois atau keinginan untuk menang. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mengontrol tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan memberi perintah atau secara tidak langsung dengan berbagai cara (Marianti, 2011).

Bourdieu dalam *Language and Symbolic Power* 1991 menyatakan bahwa interaksi sosial manusia sering kali bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan membangun dominasi atas orang lain (Ningtyas, 2015). Pihak yang mendominasi adalah pihak yang mempunyai modal paling baik sehingga pihak ini dapat dengan mudah menguasai pihak terdominasi atau pihak yang mempunyai modal paling buruk. Sikap dominasi tersebut dapat menjadi dasar terjadinya suatu tindak kekerasan sosial yang berujung diskriminasi dan ketidakadilan terhadap pihak yang terdominasi (Cahyani, 2023). Sikap saling mendominasi tersebut menimbulkan munculnya kekerasan.

Kekerasan merupakan tindakan yang bertujuan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun mental (Galtung, 1969). Secara konseptual, kekerasan adalah indikasi penyalahgunaan kuasa, ketidaksetaraan, dan dominasi. Penyalahgunaan ini terjadi ketika kuasa digunakan untuk memaksa atau membohongi, melanggar integritas korban (Sari, 2017). Salah satu contoh penyalahgunaan kekuasaan yang



h fenomena *Queen Bee Syndrome*, yaitu ketika atasan memiliki posisi lebih tinggi dalam hierarki organisasi menggunakan untuk menindas, bawahan perempuan lain. Perempuan dengan telah berhasil dalam karirnya, namun menolak untuk membantu pihak kesuksesan yang sama. Mereka sering kali menggunakan kekuasaan mereka untuk menekan dan memperlakukan bawahan

perempuannya lebih keras dan lebih buruk daripada bawahan pria (Dian, 2023). Fenomena *Queen Bee Syndrome* tidak terlepas dari konteks struktural yang lebih luas, sebagaimana tercermin dalam budaya korporat Jepang yang hierarkis dan opresif.

Pada ranah korporat Jepang, hierarki yang kaku dan norma budaya yang ketat sering menciptakan dinamika kerja yang opresif. Galtung (2013) menjelaskan bahwa kekerasan struktural dapat terlegitimasi melalui sistem yang menormalisasi ketidakadilan. Budaya perusahaan Jepang yang menekankan kesetiaan, kepatuhan, dan penghormatan pada atasan sering kali mengorbankan hak-hak individu, terutama karyawan asing atau perempuan (Toh G, 2017). Meski demikian, kekerasan dalam dunia kerja tidak semata-mata bersifat kultural, melainkan juga diperkuat oleh relasi kuasa yang timpang. Sebagaimana dijelaskan Bourdieu (1977) melalui konsep modal simbolik dan habitus yang membentuk arena dominasi dalam lingkungan profesional.

Sebaliknya, budaya kerja di negara-negara Barat pada umumnya dicirikan oleh prinsip-prinsip individualisme, kebebasan dalam menyampaikan pendapat, serta sistem organisasi yang lebih egaliter. Dalam lingkungan seperti ini, prestasi pribadi sangat dihargai, dan para karyawan didorong untuk mengambil inisiatif, berpikir secara kritis, serta menyatakan gagasan mereka tanpa terlalu memperhatikan tingkatan jabatan. Model kepemimpinan juga bersifat partisipatif, di mana pengambilan keputusan biasanya dilakukan secara demokratis atau berdasarkan kinerja masing-masing individu, bukan berdasarkan masa kerja. Nilai-nilai ini berakar pada pandangan yang sangat menghargai individualitas, seperti yang diungkapkan dalam teori Hofstede, di mana negara-negara Barat memiliki skor tinggi dalam dimensi individualisme dan rendah dalam hal jarak kekuasaan (Soeharso & Nurika, 2023).

Realitas kekerasan akibat ketimpangan relasi kuasa tidak hanya menjadi fenomena korporat, tetapi juga diabadikan dalam karya sastra. Karya sastra dianggap sebagai cerminan diri dan kehidupan manusia. Menurut Sumarjo dan Saini (dalam Rokmansyah, 2014:2), sastra merupakan ekspresi pengalaman manusia yang diwujudkan melalui bahasa, termasuk kritik terhadap sistem yang opresif. Novel, sebagai salah satu bentuk karya sastra, mampu mengangkat persoalan kekerasan struktural dalam relasi kerja (Nurgiyantoro, 2007). Realitas tersebut dapat ditemukan dalam sastra Indonesia maupun global.

Salah satu contoh nyata dalam sastra Indonesia yang mengangkat persoalan ini adalah novel *Bak Rambut Dibelah Tujuh* karya Muhammad Makhdlori (Sari, 2017) mengeksplorasi tema kekerasan di Indonesia. Novel ini menampilkan tokoh utama



mengalami kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Menariknya, pelaku kekerasan bisa laki-laki, melainkan juga perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam relasi antar perempuan, bahkan dalam relasi kekuasaan. Fenomena ini mencerminkan realitas sosial yang bisa menjadi pelaku kekerasan dalam konteks struktural.

Hal ini dapat dilihat pada novel *Teruslah Bodoh, Jangan Pintar* karya Makhdlori (Sari, 2024). Penelitian terhadap novel ini menggunakan teori

kekerasan Johan Galtung untuk mengkaji bentuk-bentuk kekerasan langsung, struktural, dan budaya yang dialami tokoh-tokohnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa karya sastra tidak hanya merefleksikan, tetapi juga mengkritik ketidakadilan masyarakat, termasuk kekerasan struktural di tempat kerja. Sejalan dengan pembahasan ini, novel *Francis Stupeur et Tremblements* (1999) karya Amélie Nothomb mengungkap bagaimana korban terjebak dalam sistem yang menormalisasi ketidakadilan akibat relasi kuasa yang timpang di dunia kerja, khususnya dalam korporat Jepang.

Novel ini berkisah tentang pengalaman Amélie Nothomb, seorang wanita muda Belgia yang baru saja lulus dari perguruan tinggi saat menjalani pekerjaan pertamanya di sebuah perusahaan di Tokyo, Jepang. Setibanya di sana, ia menyadari betapa budaya kerja Jepang berbeda jauh dari yang ia bayangkan. Sistem hierarki yang kaku, aturan tak tertulis, dan tuntutan pekerjaan yang tinggi menjadi tantangan baginya. Selain itu, ia juga kesulitan beradaptasi dengan sikap atasan di tempat kerjanya.

Pada hari pertama kerjanya, ia langsung membuat kesan buruk di mata atasannya, Tuan Saito. Ia dihukum karena kesalahan kecil dengan diberi tugas-tugas merendahkan seperti menyiapkan kopi dan menyalin dokumen secara manual. Ironisnya, kemampuan Amélie berbicara bahasa asing yang fasih justru dilarang digunakan oleh Wakil Presiden Tuan Omochi karena dianggap membahayakan otoritas perusahaan. Amélie berusaha membuktikan kemampuannya dengan mengambil inisiatif, namun justru dianggap melampaui wewenang. Hukuman yang diterimanya semakin berat, termasuk dipaksa membersihkan toilet pria oleh Fubuki Mori, atasan yang awalnya dikaguminya tetapi kemudian menjadi sumber penindasannya. Fubuki yang cemburu akan potensi Amélie, memanfaatkan jabatannya untuk terus menindas dan mengucilkan Amélie dari rekan-rekan kerjanya.

Di puncak kekerasan, Tuan Omochi menyeret Amélie ke toilet pria dan menghina dengan teriakan kasar di depan Fubuki Mori. Peristiwa itu menghancurkan harga diri Amélie, membuatnya terjebak dalam rasa malu dan keputusasaan. Meski berusaha melawan, Amélie sadar bahwa ia hanyalah korban dalam permainan kekuasaan yang kejam. Akhirnya, dengan hati yang hancur, Amélie memilih mengundurkan diri, meninggalkan Jepang, dan memulai lembaran baru sebagai seorang penulis.

Kisah ini tidak hanya menggambarkan konflik interpersonal, tetapi juga merepresentasikan kekerasan (Galtung, 2013) yang dilegitimasi melalui hierarki korporat dan budaya kepatuhan. Melalui perspektif Johan Galtung dan Pierre Bourdieu, kekerasan dalam novel ini dapat dipahami sebagai manifestasi relasi



kuasa yang telah terlembagakan. Hasil bacaan peneliti menunjukkan indakan kekerasan baik langsung, struktural, maupun kultural adanya relasi kuasa yang timpang. Berdasarkan penelusuran, yang secara khusus membahas representasi kekerasan dan sebut muncul dalam novel ini. Oleh karena itu, penelitian ini bentuk-bentuk kekerasan dalam relasi kuasa yang timpang Amélie dalam novel *Stupeur et Tremblements* karya Amélie

Nothomb.

1.2 Identifikasi Masalah

Setelah membaca novel *Stupeur et Tremblements* dan menemukan serangkaian pokok permasalahan, masalah – masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adaptasi tokoh utama di lingkungan kerja perusahaan Jepang *Stupeur et Tremblements* karya Amélie Nothomb.
2. Perbedaan budaya Jepang dan Barat dalam *Stupeur et Tremblements* karya Amélie Nothomb.
3. Kekerasan Terhadap Tokoh Utama dalam *Stupeur et Tremblements* karya Amélie Nothomb.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat dalam *Stupeur et Tremblements* karya Amélie Nothomb, peneliti membatasi masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah **Kekerasan Terhadap Tokoh Utama dalam *Stupeur et Tremblements* karya Amélie Nothomb.**

1.4 Rumusan Masalah

Agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih terarah, peneliti membuat rumusan masalah agar sesuai dengan lingkup pembahasan dari batasan masalah yang ada, yaitu :

1. Bagaimana gambaran tokoh dan gambaran hubungan antartokoh dalam novel *Stupeur et Tremblements* karya Amélie Nothomb?
2. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang dialami tokoh utama dalam novel *Stupeur et Tremblements* karya Amélie Nothomb?
3. Apa penyebab kekerasan dalam novel *Stupeur et Tremblements*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan tokoh dan hubungan antartokoh yang digambarkan dalam *Stupeur et Tremblements* karya Amélie Nothomb.
2. Menganalisis bentuk-bentuk kekerasan yang terungkap dalam novel *Stupeur et Tremblements* karya Amélie Nothomb.
3. Menjelaskan alasan terjadinya kekerasan dalam novel *Stupeur et Tremblements* karya Amélie Nothomb.

1.6 Manfaat Penelitian



an ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis
gai berikut ;

is, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah
pembaca tentang kekerasan dalam relasi kuasa yang timpang
i kerja khususnya melalui penerapan teori kekerasan Johan
teori Pierre Bourdieu. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat

memperluas wawasan pembaca mengenai penggunaan teori-teori tersebut dalam konteks sastra.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan ataupun referensi dalam penelitian selanjutnya dengan karya sastra dengan tema serupa maupun berbeda. Selain itu, diharapkan agar pembaca dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai relasi kuasa dalam lingkungan kerja yang menciptakan kekerasan, serta bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut memengaruhi individu.

1.7 Metode Penelitian

Dalam menganalisis sebuah karya sastra, penting untuk memilih metode penelitian yang tepat, khususnya berfokus pada teks atau dokumen. Bagian ini memaparkan metodologi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data yang akan memfasilitasi proses penelitian dalam novel *Stupeur et Tremblements* karya Amélie Nothomb.

1.7.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk lebih menjelaskan data penelitian dengan menggunakan bahasa deskriptif. Jenis ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menjelaskan karakteristik teks sastra secara mendalam. Analisis berfokus pada unsur intrinsik novel, khususnya tokoh dan penokohan, untuk mengkaji karakteristik tokoh dan hubungan antara Amélie dengan atasannya, serta bentuk-bentuk kekerasan yang dialami tokoh utama, yaitu Amélie itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra, dengan mengaplikasikan teori kekerasan Johan Galtung dan teori kekuasaan Pierre Bourdieu. Teori Galtung digunakan untuk menganalisis bentuk-bentuk kekerasan (langsung, struktural, dan kultural) yang dialami Amélie, sementara teori Bourdieu diaplikasikan untuk memahami alasan terjadinya kekerasan yang dialami Amélie melalui dominasi modal simbolik, modal sosial, modal kultural, habitus dan ranah. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kekerasan yang muncul dari ketidakseimbangan relasi kuasa direpresentasikan dalam novel *Stupeur et Tremblements*.

1.7.2. Data dan Sumber data

Sumber data utama untuk penelitian ini adalah novel *Stupeur et Tremblements* karya Amélie Nothomb yang terdiri 89 halaman, dan diterbitkan oleh Albin Michel pada tahun 1999. Novel ini diunduh dalam format EPUB pada tanggal melalui situs web <https://z-lib.id> dan dibaca menggunakan



dalam penelitian ini diperoleh langsung dari novel *Stupeur et Tremblements*. Data ini diperoleh dengan membaca novel secara saksama untuk mengidentifikasi narasi, dialog, serta tindakan-tindakan tokoh-tokoh terutama yang berkaitan dengan tokoh utama. Fokus data terkait pada bentuk-bentuk kekerasan yang dialami

Amélie dan alasan terjadinya kekerasan dalam novel *Stupeur et Tremblements* karya Amélie Nothomb.

- b) Data sekunder diperoleh melalui proses pencarian dan pendokumentasian informasi penting yang mendukung penelitian. Sumber-sumber pendukung ini mencakup buku teori sastra, jurnal ilmiah, artikel terkait teori yang relevan dalam penelitian tersebut, serta sumber-sumber daring yang relevan dan berkaitan dengan topik penelitian.

1.7.3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk mengumpulkan data. Metode ini dilakukan dengan cara:

1. Membaca novel *Stupeur et Tremblements* karya Amélie Nothomb secara mendalam dan berulang, untuk mengidentifikasi kebenaran data primer yang relevan dengan topik penelitian.
2. Mencari dan membaca sejumlah artikel ilmiah, jurnal, buku, dan sumber daring yang berkaitan teori kekerasan Johan Galtung, teori kekuasaan Pierre Bourdieu.
3. Menggunakan tinjauan autobiografi, kritik, atau ulasan atas novel *Stupeur et Tremblements* untuk mendapatkan informasi tambahan.

Langkah-langkah pengumpulan data dilakukan peneliti melalui beberapa proses, yaitu sebagai berikut:

1. Mengumpulkan referensi sebanyak mungkin yang terkait dengan penelitian ini. Referensi ini dapat berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, dan sumber-sumber daring lainnya.
2. Mengunduh dan Membaca semua referensi yang telah dikumpulkan.
3. Mengutip beberapa informasi berdasarkan topik.
4. Menganalisis dan menyimpulkan informasi penting dari semua referensi.
5. Menyusun data yang telah dikumpulkan dalam bentuk folder untuk memudahkan proses analisis dalam penulisan.

1.7.4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis data. Hasil analisis data berupa deskripsi yang implementasinya bersifat menuturkan, menafsirkan, memaparkan, mendeskripsikan, dan menceritakan. Selama fase analisis data, peneliti mencoba memahami karakter setiap tokoh yang terlibat dengan tokoh utama. Dalam menganalisis hubungan antar tokoh, peneliti menganalisis dinamika relasi kuasa antara tokoh-tokoh yang terlibat melakukan kekerasan terhadap tokoh utama. Selain itu, peneliti mengidentifikasi dan



untuk bentuk kekerasan berdasarkan teori Johan Galtung, yaitu struktural, dan kultural, yang dialami oleh tokoh utama. Relasi menggunakan teori Pierre Bourdieu, khususnya konsep modal simbolik), habitus, dan arena.

dikumpulkan, langkah-langkah analisis data yang dilakukan

ut:

- 1) Melakukan pembacaan dan pemahaman teks terhadap novel *Stupeur et Tremblements* agar memahami karakter tokoh dan keseluruhan konflik yang terjadi dalam novel.
- 2) Menganalisis unsur intrinsik, penokohan dan hubungan antartokoh dengan cara mengidentifikasi tokoh utama dan tokoh pendukung lainnya menggunakan narasi atau dialog yang menggambarkan karakter setiap tokoh.
- 3) Menganalisis unsur ekstrinsik, tindakan kekerasan dengan tiga bentuk kekerasan Johan Galtung: langsung, struktural, dan kultural yang dialami tokoh utama.
- 4) Menganalisis tindakan-tindakan kekerasan langsung yang jelas terlihat, seperti perkataan yang menyakitkan, perlakuan tidak adil, atau tindakan fisik.
- 5) Menganalisis bagaimana struktur hierarki perusahaan, sistem penilaian kinerja, dan budaya kerja yang menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya kekerasan.
- 6) Menganalisis bagaimana nilai-nilai budaya Jepang seperti kehormatan, kesopanan, dan kolektivisme menciptakan norma-norma yang melegitimasi bentuk-bentuk kekerasan.
- 7) Menganalisis unsur ekstrinsik, dengan menerapkan teori Pierre Bourdieu untuk memahami bagaimana modal, habitus, dan arena memengaruhi relasi kuasa dalam novel.
- 8) Menyimpulkan relasi kuasa yang timpang antara tokoh-tokoh dalam novel yang menghadirkan kekerasan terhadap tokoh utama dalam novel *Stupeur et Tremblements*.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Kajian terhadap setiap karya sastra, apa pun bentuk dan ekspresinya, memerlukan teori sebagai landasan pedoman objek penelitian dalam proses analisisnya. Begitu pula dengan pembahasan permasalahan yang terdapat dalam novel *Stupeur et Tremblements*. Pembahasan yang ada dianalisis menggunakan teori intrinsik tokoh dan penokohan, teori ekstrinsik kekerasan oleh Johan Galtung dan teori kekuasaan oleh Pierre Bourdieu.

2.1.1. Tokoh dan Penokohan

Tokoh dan penokohan dalam karya sastra sangat penting untuk menghidupkan cerita. Istilah tokoh mengacu pada pelaku cerita yang mengalami peristiwa dalam sebuah narasi. Sedangkan, istilah penokohan mencakup definisi yang lebih luas daripada sekedar tokoh, karena istilah ini membahas berbagai aspek seperti bagaimana identitas, perwatakannya, penempatan mereka dalam narasi, dan penggambaran mereka dengan cara pengarang menyampaikan pemahaman yang jelas kepada pembaca. Selain itu, penokohan berkaitan dengan metode yang digunakan untuk mewujudkan dan mengembangkan karakter dalam sebuah narasi (Priyatni, 2010: 110). Menurut Minderop (2010), tokoh merujuk pada karakter atau individu yang hadir dalam karya sastra, sedangkan penokohan adalah metode yang digunakan untuk mewujudkan dan mengembangkan karakter dalam sebuah narasi, memberikan kedalaman pada tokoh sebagai pelaku cerita.

Tokoh dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan sifat atau peran dalam suatu cerita. Berdasarkan sifatnya tokoh dibagi menjadi protagonis dan antagonis. Protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat-sifat yang dikagumi sehingga disukai pembaca. Sebaliknya, antagonis dicirikan oleh sifat-sifat negatif yang tidak sesuai dengan keinginan pembaca. Sementara itu, berdasarkan perannya, Tokoh dapat dikategorikan menjadi tokoh utama dan tokoh pendukung dalam sebuah cerita. Tokoh utama berfungsi sebagai tokoh sentral dalam cerita, sering muncul dan bertindak sebagai titik fokus dalam cerita. Sebaliknya, tokoh pendukung adalah mereka yang membantu tokoh utama, berkontribusi pada perkembangan narasi (Priyatni, 2010: 111).

Sama Halnya dengan tokoh, menurut (Amidong 2018: 4-5) penokohan dapat dilakukan melalui dua jenis, yaitu secara langsung atau deskriptif/analitis dan secara dramatis. Jenis pertama yaitu Secara langsung, pengarang an tokoh secara langsung dan terperinci, meliputi aspek-aspek ian, ciri fisik, pekerjaan, dan lain-lain. Dengan demikian, tokoh can kepada pembaca melalui deskripsi identitasnya yang apat meliputi sikap, sifat, perilaku, dan ciri fisiknya. Jenis kedua gsung atau dramatis. Pengarang mengungkap sifat dan ciri fisik



suatu tokoh dengan cara mengilustrasikan bagaimana tokoh lain menanggapi tokoh utama, dengan menggambarkan lingkungan tokoh, dan melalui dialog yang dipertukarkan antartokoh dalam narasi.

2.1.2. Teori Peristiwa

Teori peristiwa (*event theory*) dalam sastra menekankan pada hubungan sebab-akibat, konflik, dan transformasi tokoh dalam alur cerita. Menurut Luxemburg (dalam Nurgiyantoro, 2007:117), peristiwa dalam narasi tidak hanya berupa kejadian fisik, tetapi juga perubahan psikologis dan sosial yang dialami tokoh. Pembaca perlu mencermati peristiwa-peristiwa tersebut karena setiap kejadian dalam cerita pasti melibatkan peran para tokoh. Seluruh rangkaian peristiwa ini kemudian menyatu membentuk alur cerita secara utuh. Selain itu, melalui peristiwa-peristiwa dalam cerita, pembaca dapat lebih mudah memahami dan mengkaji tindakan serta sikap para tokoh.

Dalam analisis naratif, klasifikasi peristiwa berdasarkan tingkat kepentingannya terhadap keseluruhan cerita merupakan pendekatan kritis yang penting untuk memahami struktur sebuah novel. Konsep ini, yang awalnya dikembangkan oleh Seymour Chatman (1978) dalam bukunya *Story and Discourse* dan kemudian diadopsi oleh banyak ahli sastra, membagi peristiwa dalam cerita menjadi dua jenis utama: peristiwa inti (*kernel*) dan peristiwa pendukung (*satellite*). Pembagian ini membantu kita memahami bagaimana pengarang membangun alur cerita yang koheren dan bermakna (Wiyatmi, 2017).

Peristiwa inti atau *kernel* adalah momen penting dalam sebuah cerita yang bersifat pokok dan tidak bisa diabaikan tanpa mengubah alur narasi secara keseluruhan. Ciri utamanya adalah kemampuannya menentukan perkembangan plot, berperan sebagai titik balik yang mengubah arah cerita. Di sisi lain, peristiwa pendukung atau *satellite* adalah unsur cerita yang berfungsi memperkaya narasi tanpa menjadi penentu alur utama. Salah satu perannya adalah memperdalam karakterisasi tokoh. Dengan demikian, meski tidak sepenting kernel, *satellite* tetap memiliki peran krusial dalam memperkaya pengalaman membaca dan memperdalam pemahaman terhadap cerita.

2.1.3. Teori Kekerasan Johan Galtung

Dalam interaksi manusia yang terjadi dalam masyarakat tidak hanya mendorong hubungan positif, tetapi juga hubungan yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Kekerasan dalam berbagai bentuknya, merupakan tanda penyalahgunaan kekuasaan, ketidaksetaraan, dan dominasi (Rahmawati, 2022). Penyalahgunaan



...ika seseorang menggunakan kekuasaannya untuk menggertak
...ain, melanggar integritas dan keyakinan mereka. Perbedaan
...du, kelompok, atau bangsa sering kali menjadi pemicu
...kuasaan, di mana pihak yang memiliki status lebih tinggi
...nasi pihak yang lebih rendah.

...s penyalahgunaan kekuasaan, sikap takut para korban menjadi
...uat kekerasan. Korban penyalahgunaan kekuasaan biasanya

diintimidasi dan disubordinasikan, yang menyebabkan kekerasan terus berlanjut (Galtung, 2013). Hal ini sering terjadi, seperti ketika kelompok atau individu yang kuat menindas kelompok atau individu yang lemah dengan kuasanya. Ancaman kekerasan juga merupakan kekerasan, sebagai penghinaan terhadap pikiran dan jiwa, menciptakan distorsi dan keputusan melalui ketakutan.

Dalam bukunya yang berjudul *Pioneer of Peace Research* (2013), Galtung menyatakan bahwa:

"Violence leaves deep wounds, trauma, that is difficult to heal. Violence to the mind takes the form of distorted cognitions and emotions, and to the spirit the form of hopelessness, possibly because a meaning-producing project failed" (Galtung, 2013:35).

"Kekerasan meninggalkan luka yang dalam, trauma, yang sulit disembuhkan. Kekerasan pada pikiran berbentuk kognisi dan emosi yang terdistorsi, dan pada jiwa berbentuk keputusan, mungkin karena sebuah proyek yang menghasilkan makna gagal."

Kognisi dan emosi yang terdistorsi dapat berupa cara berpikir yang tidak rasional dan perasaan yang tidak stabil akibat pengalaman kekerasan. Sementara itu, keputusan dapat muncul ketika seseorang merasa tidak memiliki harapan atau jalan keluar dari situasi kekerasan. Menurut Galtung, kekerasan didefinisikan sebagai penyebab perbedaan antara potensi dan aktual, antara apa yang 'bisa jadi' dan apa yang 'ada terjadi'. Dengan kata lain, bila potensial lebih tinggi dari aktual, pasti ada kekerasan. Hal ini memberikan makna bahwasannya jika terjadi suatu keadaan yang dilewatkan begitu saja (di bawah potensial) meski seharusnya keadaan (jasmani dan mental) tersebut dapat di atasi, maka ini dapat disebut sebagai kekerasan (Windhu, 1992: 64).

Galtung (1969) memetakan kekerasan dalam bentuk Segitiga Kekerasan, yang terdiri dari: (1) Kekerasan Langsung (*Direct Violence*), (2) Kekerasan Struktural (*Structural Violence*), dan (3) Kekerasan Kultural (*Cultural/ Symbolic Violence*). Segitiga Kekerasan ini membantu mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat, baik yang terlihat jelas maupun yang tersembunyi.

2.1.2.1 Kekerasan Langsung (*Direct Violence*)

Bentuk kekerasan pertama yang ditulis oleh Galtung yaitu Kekerasan langsung (*direct violence*). Menurut Galtung (1969), kekerasan langsung merupakan



iliki hubungan subjek-objek yang jelas dan dapat dilihat sebagai ini melibatkan tindakan fisik dan verbal yang dilakukan oleh orang lain, dengan pelaku dan korban yang jelas. Tindakan a segala bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik vidu lain. Galtung dalam *Violence, Peace, and Peace Research* ahwa:

"Violence with a clear subject-object relation is manifest because it is visible as action. It corresponds to our ideas of what drama is, and it is personal because persons are committing the violence." (Galtung, 1969:171).

"Kekerasan dengan relasi subjek-objek yang jelas adalah nyata karena terlihat sebagai tindakan. Hal ini sesuai dengan gagasan kita tentang apa itu drama, dan bersifat personal karena ada orang yang melakukan kekerasan"

Artinya, Kekerasan langsung terlihat jelas karena melibatkan tindakan nyata yang bisa dilihat, seperti menyiksa, membunuh, atau melukai seseorang.

Dalam bukunya *Violence, Peace, and Peace Research* (1969:169), Galtung membedakan kekerasan fisik dalam konteks kekerasan langsung menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Kekerasan biologis adalah kekerasan yang mengurangi kemampuan fisik seseorang di bawah potensi maksimalnya, seperti menyebabkan luka fisik, penyakit, atau bahkan kematian. kekerasan ini merusak kapasitas fisik seseorang.
- b) Kekerasan fisik sebagai bentuknya sendiri adalah adalah jenis kekerasan yang melanggar kebebasan bergerak seseorang, seperti memenjarakan seseorang, memborgol mereka, atau akses yang tidak setara terhadap transportasi. pada akhirnya membatasi kebebasan bergerak seseorang.

Galtung Dalam *Violence, Peace, and Peace Research* (1969), mencontohkan kekerasan langsung melalui tindakan seorang suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya dalam rumah tangga. Galtung menyatakan bahwa :

"when one husband beats his wife there is a clear case of personal violence" (Galtung, 1969:171).

ketika seorang suami memukuli istrinya, maka jelas terjadi kekerasan dalam rumah tangga"

Tindakan ini merupakan contoh kekerasan langsung yang dapat diamati secara langsung dan melibatkan secara jelas pelaku dan korban. Beberapa contohnya termasuk penyiksaan, pembunuhan, penganiayaan, perundungan, dan berbagai bentuk diskriminasi. Selain itu kekerasan langsung juga mengandung serangan verbal seperti memfitnah dan tidak menghormati yang menyebabkan trauma psikologis seseorang (Fatahilah, 2022). Dalam *Violence, Peace, and Peace Research* (1969), Galtung menyatakan bahwa:



... distinction is less important than the basic distinction between works on the body, and violence that works on the soul; where violence should include lies, brainwashing, indoctrination of various kinds, and other things that serve to decrease mental potentialities" (Galtung, 1969:169)

“Kekerasan yang bekerja pada jiwa mencakup kebohongan, cuci otak, doktrinasi dalam berbagai bentuk, ancaman, dan lain sebagainya, yang berfungsi untuk mengurangi potensi mental seseorang”

Galtung berpendapat, kekerasan langsung memiliki karakteristik yang lebih jelas dan melibatkan tindakan yang nyata dibandingkan dengan kekerasan struktural dan kultural.

2.1.2.2 Kekerasan Struktural (*Structural Violence*)

Selain kekerasan langsung, bentuk kekerasan kedua yang ditulis oleh Johan Galtung yaitu, kekerasan struktural (*structural violence*) yakni bentuk ketidakadilan yang tertanam dalam sistem sosial. Sistem ini dirancang sedemikian rupa sehingga menguntungkan sebagian orang dan merugikan yang lain. Kekerasan ini dapat dikatakan dibentuk oleh kekuasaan yang dilakukan oleh struktur, tetapi tersembunyi di balik struktur (Fachrur, 2023).

Berbeda dengan kekerasan langsung, kekerasan struktural merupakan kekerasan tanpa hubungan pelaku-korban yang jelas karena dibangun dalam struktur masyarakat. Sebagai contoh, dalam bukunya yang berjudul, *Violence, Peace, and Peace Research* (1969), Galtung mendeskripsikan bahwa :

“Correspondingly, in a society where life expectancy is twice as high in the upper as in the lower classes, violence is exercised even if there are no concrete actors one can point to directly attacking others, as when one person kills another” (Galtung, 1969:171).

“Dalam masyarakat di mana harapan hidup kelas atas dua kali lebih tinggi daripada kelas bawah, kekerasan terjadi bahkan jika tidak ada pelaku konkret yang dapat ditunjuk secara langsung menyerang orang lain, seperti ketika seseorang membunuh orang lain”

Meskipun tidak ada individu yang secara langsung “membunuh” kelompok masyarakat kelas bawah, namun dalam masyarakat di mana harapan hidup kelas atas dua kali lebih tinggi daripada kelas bawah, ketidakadilan dalam struktur sosial, dan perbedaan harapan hidup yang signifikan, merupakan contoh dari kekerasan struktural. Galtung Dalam *Violence, Peace, and Peace Research* (1969) mengemukakan bahwa:

“Resources are unevenly distributed, as when income distributions are heavily skewed, literacy/education unevenly distributed, medical services me districts and for some groups only, and so on. Above all the side over the distribution of resources is unevenly distributed” (19 :171).



a tidak terdistribusi secara merata, seperti distribusi pendapatan timpang, melek huruf/pendidikan yang tidak merata, layanan ng hanya ada di beberapa daerah dan hanya untuk beberapa

kelompok saja, dan seterusnya. Di atas semua itu, kekuasaan untuk memutuskan distribusi sumber daya tidak terdistribusi secara merata.”

Hal ini karena terbentuknya kekerasan struktural sebagai perwujudan dari aktualitas individu dalam struktur tersebut sehingga manusia di dalamnya sebenarnya tidak menyadari adanya perlakuan yang tidak adil. kekerasan struktural antara lain perampasan hak untuk hidup dan mata pencaharian, hukum, ras tertentu, kebijakan atau praktik yang hanya menguntungkan kelompok di atas kelompok lain.

Dalam konteks kekerasan struktural, eksploitasi adalah contoh nyata dari ketidakadilan dalam masyarakat. Eksploitasi terjadi ketika kelompok yang dominan mendapatkan keuntungan besar karena mempunyai kuasa dalam masyarakat, sementara kelompok yang tidak memiliki kuasa, mengalami kerugian. Artinya, ada kelompok atas yang mendapat keuntungan jauh lebih besar dibandingkan kelompok bawah. Selain itu kekerasan struktural diwujudkan dalam bentuk keterasingan (*alienation*) dan penindasan (*repression*) yang dibangun oleh struktur masyarakat (Galtung, 2013:38).

Menurut Galtung (2013) kekerasan struktural terbagi menjadi dua bentuk yang memengaruhi individu dalam masyarakat, yaitu kekerasan struktural vertikal dan horizontal. Kekerasan struktural vertikal muncul ketika sistem sosial mengatur individu dalam posisi hierarkis yang tidak setara, di mana sebagian orang memiliki kekuasaan dan akses lebih besar terhadap kebutuhan dasar. Sementara individu yang tidak memiliki kekuasaan ditempatkan dalam posisi terbawah, sehingga menciptakan ketimpangan sosial yang signifikan. Sementara itu, kekerasan struktural horizontal terjadi ketika individu terikat dalam hierarkis yang kaku, menghambat perkembangan identitas dan kebebasan. Kombinasi keduanya menyebabkan tekanan struktural yang berlebihan, baik dalam bentuk dominasi hierarkis maupun pembatasan sosial yang menghalangi kebebasan individu.

2.1.2.3 Kekerasan Kultural (*Cultural Violence*)

Bentuk kekerasan ketiga yang ditulis oleh Johan Galtung yaitu, kekerasan kultural (*cultural violence*) adalah bentuk kekuasaan yang tertanam dalam budaya dan norma-norma suatu masyarakat. Galtung (1990) mengembangkan bentuk konsep kekerasan kultural untuk menjelaskan bagaimana norma-norma budaya diperdebatkan melalui penggunaan ideologi, agama, bahasa, seni, dan bukti ilmiah, yang semuanya digunakan untuk mendukung kekerasan langsung dan struktural. kekerasan ini membiarkan atau mendukung kebiasaan suatu budaya dalam masyarakat terjadinya dua bentuk kekerasan sebelumnya (*direct & structural*).

er of Peace Research (2013) mendefinisikan bahwa:

*...ence are those aspects of culture, the symbolic sphere of our
amplified by religion and ideology, language and art, empirical
formal science (logic, mathematics) that can be used to justify,
act or structural violence”*(Galtung, 2013:41).



“Kekerasan kultural adalah aspek-aspek budaya, ranah simbolik keberadaan kita yang dicontohkan oleh agama dan ideologi, bahasa dan seni, ilmu empiris dan ilmu formal (logika, matematika) yang dapat digunakan untuk membenarkan, melegitimasi kekerasan langsung atau struktural.”

Kekerasan kultural memiliki peran penting dalam menormalisasi bahkan melegitimasi tindakan kekerasan dengan demikian dapat diterima di masyarakat, baik yang bersifat langsung (seperti kekerasan fisik) maupun struktural (seperti diskriminasi).

Galtung (2013) mengembangkan segitiga kekerasan untuk mengeksplorasi hubungan antara kekerasan kultural, kekerasan langsung, dan kekerasan struktural. Segitiga ini menggambarkan bagaimana ketiga jenis kekerasan tersebut saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Galtung dalam *Pioneer of Peace Research* (2013) menyatakan bahwa:

“Cultural violence can now be added as the third super-type and put in the third corner of a violence triangle. Stood on its direct and structural violence feet the image invoked is cultural violence as the legitimizer of both. Stood on its direct violence head the image is structural and cultural sources of direct violence” (Galtung, 2013:46).

“Kekerasan kultural sekarang dapat ditambahkan sebagai tipe super ketiga dan ditempatkan di sudut ketiga segitiga kekerasan. Berdiri di atas kaki kekerasan langsung dan strukturalnya, gambaran yang muncul adalah kekerasan kultural sebagai pemberi legitimasi bagi keduanya. Berdiri di atas kepala kekerasan langsungnya, gambaran yang muncul adalah sumber struktural dan budaya dari kekerasan langsung.”

Dalam konteks segitiga kekerasan menurut Galtung, ketika segitiga kekerasan kultural berdiri pada sudut kekerasan langsung dan struktural, kekerasan kultural menjelma menjadi kekuatan yang melegitimasi kedua bentuk kekerasan tersebut. Dengan kata lain, budaya memiliki kemampuan untuk menormalisasi atau bahkan membenarkan tindakan kekerasan yang bersifat langsung maupun ketidakadilan yang berakar dalam struktur masyarakat. Sebagai contoh, ideologi yang mengedepankan superioritas rasial dapat digunakan untuk melegitimasi praktik diskriminasi (kekerasan struktural) maupun tindakan kekerasan fisik (kekerasan langsung) terhadap kelompok minoritas (Sari, 2017).

2.1.4. Teori Kekuasaan Pierre Bourdieu



eu, seorang filsuf terkemuka, mencatat bahwa kekuasaan berap-konsep yang terstruktur. Bourdieu memandang kekuasaan kultural dan simbolis yang dilegitimasi melalui interaksi antara Kabelen & Putri, 2022). Kekuasaan bukanlah semata-mata kemampuan untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang cara, termasuk kekerasan. Kekerasan dan kekuasaan adalah terpisahkan, karena kekerasan sering digunakan sebagai alat

untuk mempertahankan atau memperkuat kekuasaan. Keduanya bergantung pada modal sebagai instrumennya.

Dalam konteks ini, modal memainkan peran kunci sebagai instrumen yang memungkinkan kekuasaan dan kekerasan diwujudkan. Modal, seperti modal sosial (jaringan relasi), modal budaya (pengetahuan dan keterampilan), dan terutama modal simbolik (prestise dan pengakuan), memberikan individu atau kelompok sumber daya untuk melaksanakan kekuasaan. Modal simbolik, misalnya, memberikan legitimasi dan otoritas kepada individu, seperti seorang atasan di tempat kerja yang memiliki pengaruh besar dan dapat menggunakan kekuasaannya terhadap pihak yang lebih lemah, sering kali berusaha mengubah perilaku pihak tersebut (Martono, 2012:39). Kelompok yang memiliki lebih banyak akses modal cenderung mempertahankan kekuasaannya, memungkinkan mereka melakukan kekerasan terhadap orang lain. Kekerasan di sini tidak hanya tindakan brutal, tetapi juga tertanam dalam struktur kekuasaan yang kompleks (Ahmad, 2021). Mereka mempertahankan dan memperkuat kepentingan kelompoknya sendiri, menetapkan struktur kekuasaan yang ada sehingga melahirkan relasi kekuasaan yang tidak seimbang, di mana pihak dominan berkuasa atas pihak terdominasi.

Pihak dominan dalam relasi kuasa dapat menggunakan kekuasaannya untuk menekan pihak terdominasi, baik secara fisik, verbal, emosional, maupun struktural. Menurut Bourdieu (dalam Martono, 2012; Krisdinanto, 2014), faktor utama yang memengaruhi relasi kekuasaan adalah dominasi sosial, yang mencakup modal, habitus, dan arena. Dominasi sosial terjadi ketika suatu kelompok atau individu memiliki kekuasaan lebih besar dan menggunakannya untuk mempertahankan posisi mereka.

2.1.2.1. Modal

Salah satu aspek kunci dominasi sosial adalah modal. Bourdieu membagi modal menjadi tiga jenis: modal sosial (*social capital*), (jaringan dan hubungan), modal budaya (*cultural capital* pengetahuan dan kompetensi), dan modal simbolik (*symbolic capital*) (pengakuan dan legitimasi).

a) Modal Sosial

Modal sosial, khususnya, memungkinkan individu mengakses informasi, dukungan, dan peluang yang tidak tersedia bagi mereka yang tidak memiliki jaringan kuat. Misalnya, dalam dunia politik, koneksi dengan elit dapat menentukan keberhasilan seseorang. Lebih jauh, Bourdieu dalam *Distinction : A Social Critique of the Judgement of Taste* (1984) menegaskan bahwa modal sosial tidak hanya sekedar jaringan, tetapi juga alat untuk mempertahankan hierarki sosial melalui kelas dominan.



do not move about in social space in a random way, partly 'are subject to the forces which structure this space (e.g. , bjective mechanisms of elimination and channelling), and partly 'resist the forces of the field with their specific inertia, that is, es, which may exist in embodied form, as dispositions, or in

objectified form, in goods, qualifications etc" (Bourdieu, 1984:110).

"Individu tidak bergerak dalam ruang sosial secara acak, sebagian karena mereka tunduk pada kekuatan yang membentuk ruang ini (misalnya, melalui mekanisme objektif eliminasi dan penyaluran), dan sebagian lagi karena mereka melawan kekuatan medan dengan inersia spesifik mereka, yaitu, properti mereka, yang mungkin ada dalam bentuk diwujudkan sebagai disposisi atau dalam bentuk objektif, dalam barang, kualifikasi, dll."

Bourdieu menegaskan bahwa individu tidak bergerak secara acak dalam ruang sosial, melainkan dipengaruhi oleh kekuatan yang membentuk struktur sosial. Ini menunjukkan bahwa ada struktur yang mendasari interaksi sosial, di mana modal sosial berperan penting dalam menentukan posisi individu dalam struktur tersebut.

Konsep ini diperdalam dalam *The Forms of Capital* (1986) :

"Social capital is the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition – or in other words, to membership in a group¹⁰ – which provides each of its members with the backing of the collectivity-owned capital, a "credential" which entitles them to credit, in the various senses of the word" (Bourdieu, 1986:286).

"Modal sosial adalah keseluruhan sumber daya aktual atau potensial yang terhubung dengan kepemilikan jaringan hubungan yang langgeng, yang kurang lebih terinstitusionalisasi, berupa saling mengenal dan pengakuan timbal balik atau dengan kata lain, keanggotaan dalam sebuah kelompok yang memberi setiap anggotanya dukungan kolektif dari modal yang dimiliki bersama, sebuah "kredensial" yang memberi mereka hak untuk mendapatkan kredit, dalam berbagai arti kata".

Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai keseluruhan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki individu melalui jaringan hubungan sosial. Sumber daya ini tidak hanya bergantung pada relasi individu dengan orang-orang di sekitarnya, tetapi juga bagaimana hubungan tersebut memberikan dukungan kepada individu-individu yang terkait.

Dalam modal sosial, akses tidak selalu adil. Dalam banyak kasus, hanya kelompok tertentu yang memiliki akses ke jaringan sosial yang bernilai tinggi. Modal sosial dapat disalahgunakan oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan dalam jaringan tersebut. Seperti yang Bourdieu katakan dalam *The Forms of Capital*, 1986) bahwa:



paradoxes of delegation is that the mandated agent can wield up the power which enables him to concentrate the group in usurpation is hidden in the fact that a group as a whole can be in the various senses of the term, by a clearly delimited which is perfectly visible to all, known to all, recognized by all – the notables', those who are known – whose paradigm is the nobility, speak in the name of the whole group, represent the whole exercise authority in the name of the whole group"(Bourdieu,

1986:289).

Salah satu paradoks delegasi adalah bahwa agen yang diberi mandat dapat mengerahkan pada kelompok kekuatan yang memungkinkan kelompok itu sendiri untuk ia konsentrasikan. Penyelewengan ini tersembunyi dalam fakta bahwa suatu kelompok secara keseluruhan dapat diwakili, dalam berbagai makna kata tersebut, oleh subkelompok yang terbatas dengan jelas dan terlihat sempurna oleh semua orang, dikenal oleh semua orang, dan diakui oleh semua orang, yaitu kaum *nubiles*, "orang-orang yang dikenal," yang paradigmanya adalah kaum bangsawan, dan yang dapat berbicara atas nama seluruh kelompok, mewakili seluruh kelompok, dan menjalankan otoritas atas nama seluruh kelompok.

Bourdieu menjelaskan bagaimana kekuasaan dalam jaringan sosial dapat tertuju pada beberapa individu yang kemudian dapat menyalahgunakan atau memanipulasi modal sosial untuk kepentingan pribadi mereka sendiri, bahkan merugikan kelompok yang seharusnya mereka wakili. Hal ini terutama terjadi ketika individu yang diberi mandat untuk memimpin suatu kelompok sebenarnya adalah orang yang membentuk kelompok itu sendiri dan mengendalikan keberadaannya.

b) Modal Budaya

Setelah memahami modal sosial sebagai jaringan dan hubungan yang memberikan akses pada sumber daya, selanjutnya Modal budaya (*Cultural capital*). Modal budaya merupakan modal yang mencakup berbagai keterampilan dan kemampuan individu seperti perilaku, gaya komunikasi, penampilan fisik, dan interaksi sosial, berkontribusi pada struktur sosial dan merupakan salah satu bentuk modal yang menentukan posisi seseorang dalam ruang sosial. Menurut Bourdieu dalam *The Forms of Capital*, (1986) mengatakan, modal budaya dapat terwujud dalam tiga bentuk yang berbeda:

"Cultural capital can exist in three forms: in the embodied state, i.e., in the form of long-lasting dispositions of the mind and body; in the objectified state, in the form of cultural goods (pictures, books, dictionaries, instruments, machines, etc.), which are the trace or realization of theories or critiques of these theories, problematics, etc.; and in the institutionalized state, a form of objectification which must be set apart because, as will be seen in the case of educational qualifications, it confers entirely original properties on the cultural capital which it is presumed to guarantee"(Bourdieu, 1986:282).



Modal budaya dapat eksis dalam tiga bentuk: dalam keadaan yang *embodied state*), yaitu dalam bentuk disposisi pikiran dan tubuh yang sudah lama; dalam keadaan yang diobjektifikasi (*objectified*) dalam bentuk barang-barang budaya (gambar, buku, kamus, mesin, dll.), yang merupakan jejak atau realisasi dari teori atau teori ini, problematika, dll.; dan dalam keadaan yang *institutionalized state*), suatu bentuk objektivasi yang harus diakui, seperti yang akan dilihat dalam kasus kualifikasi

pendidikan, ia memberikan properti yang sepenuhnya orisinal pada modal budaya yang dianggapnya menjamin."

Pertama, *Embodied state* (Keadaan yang diwujudkan) adalah jenis modal budaya yang secara harfiah "menyatu" dengan individu, seperti kebiasaan pikiran, tindakan, dan rasa yang didapatkan melalui proses pendidikan dan sosialisasi. Meskipun tidak berwujud dan sulit diwariskan, modal budaya dalam *embodied state* berperan penting dalam membentuk interaksi sosial dan persepsi orang lain terhadap individu. Selain dalam bentuk yang diwujudkan, modal budaya juga dapat hadir dalam bentuk objek.

Kedua, *Objectified state* (Keadaan yang diobjektifikasi) adalah jenis modal budaya yang berbentuk benda fisik, seperti buku, lukisan, alat musik, yang pada dasarnya adalah representasi ide, teori, pemikiran dari budaya tersebut. Kepemilikan benda-benda ini juga merupakan simbol status, yang menunjukkan tingkat modal budaya seseorang. Misalnya, seseorang yang memiliki koleksi buku-buku filsafat tidak hanya menunjukkan bahwa ia memiliki pengetahuan tentang filsafat, tetapi juga dapat menggunakan pengetahuannya ini untuk berdiskusi dengan orang lain, membangun jaringan dengan sesama pecinta filsafat, atau bahkan menulis artikel dan mendapatkan pengakuan di bidang tersebut. Modal ini juga sering kali tergantung pada konteks sosial dan kemampuan individu untuk memanfaatkan modal tersebut.

Ketiga, *Institutionalized state* (Keadaan yang dilembagakan) adalah jenis modal budaya yang sudah diakui dan dilembagakan oleh sebuah institusi, terutama melalui dunia pendidikan. Contohnya adalah gelar, sertifikat keahlian, dan ijazah. Modal budaya dalam *institutionalized state* ini memberikan properti atau nilai tambah pada modal budaya yang dijaminnya. Sebagai ilustrasi, seseorang yang bergelar lebih mungkin mendapatkan pekerjaan tertentu dibandingkan dengan seseorang yang tidak bergelar, padahal keduanya mungkin memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sama. Gelar adalah suatu "jaminan" atau pengakuan formal akan modal budaya yang dimiliki.

Bourdieu menegaskan bahwa modal budaya adalah faktor utama dalam menentukan posisi seseorang dalam struktur sosial. Orang dengan modal budaya yang lebih tinggi memiliki keuntungan dalam setiap aspek eksistensi, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun interaksi sosial. Ketika modal budaya dilembagakan, ia akan memiliki manifestasi yang spesifik, terutama melalui keterlibatan dan pengakuan dari lembaga pendidikan, yang tercermin dalam gelar atau diploma akademis. Sikap dan pendekatan seseorang dalam interaksinya dengan orang lain



aktor yang memadai tentang kedudukan sosialnya (Martono, 2010). Modal budaya, dalam ketiga bentuknya, adalah kunci untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial tidak hanya terjadi, tetapi juga diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Bourdieu, 1986).

Selain modal budaya, modal simbolik juga memainkan peran penting dalam mempertahankan kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat.

Modal simbolik adalah media yang membawa adanya hubungan antara kekuasaan dengan kekerasan simbolik. Ketika pemilik modal simbolik menggunakan kekuatannya terhadap pihak lain yang memiliki kekuasaan yang lebih lemah, pihak yang lemah tersebut cenderung berusaha mengubah tindakan-tindakannya. Dengan kata lain, kekerasan simbolik terjadi karena peran modal simbolik (Bourdieu dalam Martono, 2012:39).

Modal simbolik merujuk pada bentuk kekayaan atau kekuasaan yang tidak terlihat secara langsung, seperti prestise, pengakuan, atau status sosial. Seperti yang dikatakan oleh Bourdieu dalam *Outline of a Theory of Practice* (1977), bahwa:

"Symbolic capital, a transformed and thereby disguised form of physical "economic" capital, produces its proper effect inasmuch, and only inasmuch, as it conceals the fact that it originates in "material" forms of capital which are also, in the last analysis, the source of its effects"(Bourdieu, 1977:183).

Modal simbolik, sebuah bentuk modal 'ekonomi' fisik yang diubah dan karenanya disamarkan, menghasilkan efeknya yang tepat sejauh, dan hanya sejauh, ia menyembunyikan fakta bahwa ia berasal dari bentuk modal 'material' yang juga, pada akhirnya, merupakan sumber efeknya."

Bourdieu memperjelas konsep modal simbolik dalam *The Forms of Capital* (1986), ia menyatakan:

"Symbolic capital, that is to say, capital – in whatever form – insofar as it is represented, i.e., apprehended symbolically, in a relationship of knowledge or, more precisely, of misrecognition and recognition, presupposes the intervention of the habitus, as a socially constituted cognitive capacity" (Bourdieu, 1986:289).

Modal simbolik, yaitu modal dalam bentuk apa pun sejauh ia direpresentasikan, yaitu, dipahami secara simbolis, dalam hubungan pengetahuan atau, lebih tepatnya, salah pengenalan dan pengakuan, mensyaratkan intervensi habitus, sebagai kapasitas kognitif yang terbentuk secara sosial."

Modal simbolik dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti kantor yang luas di lokasi yang mahal, mobil mewah yang dikemudikan, atau tanda-tanda tidak mencolok yang menunjukkan status tinggi pemiliknya (Krisdinanto, 2014).



Modal simbolik tidak hanya mencerminkan kekayaan material, atau untuk mempertahankan dan memperkuat posisi sosial dalam

dan dalam dominasi sosial adalah habitus. Habitus sangat penting dalam kerja mekanisme kekuasaan. Menurut Bourdieu, habitus disposisi dan praktik yang terinternalisasi, yang muncul dari

pengalaman dan posisi individu dalam struktur sosial. Habitus bersifat menghasilkan sekaligus dihasilkan oleh kehidupan sosial. Bourdieu mendefinisikan habitus dalam *Outline of a Theory of Practice* (1997) bahwa:

"The structures constitutive of a particular type of environment (e.g. the material conditions of existence characteristic of a class condition) produce habitus, systems of durable, transposable dispositions, structured structures predisposed to function as structuring structures, that is, as principles of the generation and structuring of practices and representations which can be objectively "regulated" and "regular" without in any way being the product of obedience to rules, objectively adapted to their goals without presupposing a conscious aiming at ends or an express mastery of the operations necessary to attain them and, being all this, collectively orchestrated without being the product of the orchestrating action of a conductor." (Bourdieu, 1997:72).

"Sistem disposisi yang tahan lama dan dapat dipindahkan, struktur yang terstruktur yang cenderung berfungsi sebagai struktur yang menata, yaitu, sebagai prinsip pembangkitan dan penataan praktik dan representasi yang secara objektif dapat 'diatur' dan 'teratur' tanpa dengan cara apapun menjadi produk kepatuhan pada aturan, secara objektif diadaptasi dengan tujuan mereka tanpa mengandaikan tujuan yang disadari atau penguasaan eksplisit atas operasi yang diperlukan untuk mencapainya dan, menjadi semua ini, diorkestrasi secara kolektif tanpa menjadi produk tindakan orkestrasi seorang konduktor".

Habitus seseorang dibentuk oleh pengalaman masa lalu dan lingkungan sosialnya. Hal ini mencakup nilai, norma, dan praktik yang mereka pelajari dan serap melalui interaksi sosial dan keterlibatan dalam situasi tertentu. Pengalaman-pengalaman ini membuat seseorang memandang dan merespons dunia dengan cara tertentu yang sesuai dengan latar belakang mereka. Sebagaimana yang dinyatakan Bourdieu dalam *The Logic of Practice* (1990) bahwa:

"The habitus, a product of history, produces individual and collective practices - more history - in accordance with the schemes generated by history. It ensures the active presence of past experiences, which, deposited in each organism in the form of schemes of perception, thought and action, tend to guarantee the 'correctness' of practices and their constancy over time, more reliably than all formal rules and explicit norms." (Bourdieu, 1990:54).

"Habitus, sebagai produk sejarah, menghasilkan praktik-praktik individual dan kolektif lebih banyak sejarah sesuai dengan skema yang dihasilkan oleh memastikan kehadiran aktif pengalaman-pengalaman masa lalu, dan dalam setiap organisme dalam bentuk skema persepsi, dan tindakan, cenderung menjamin 'kebenaran' praktik dan gannya dari waktu ke waktu, lebih andal daripada semua dan norma eksplisit."



sosialisasi dalam masyarakat yang berkembang menjadi kebiasaan yang terstruktur. Hal ini dianggap sebagai sistem disposisi yang terus-menerus terkondisikan, dapat diwariskan, dan sering kali terwujud seolah-olah alami (Krisdinanto, 2014). Pengalaman-pengalaman awal, terutama dalam lingkungan keluarga, memainkan peran penting dalam membentuk habitus. Pengalaman-pengalaman tersebut tidak hanya memengaruhi habitus secara langsung, tetapi juga menjadi rujukan bagi cara individu mengalami dan menafsirkan pengalaman-pengalaman selanjutnya.

Sebagaimana yang dinyatakan Bourdieu dalam *Outline of a Theory of Practice* (1997) bahwa:

“The principle of these individual differences lies in the fact that, being the product of a chronologically ordered series of structuring determinations, the habitus, which at every moment structures in terms of the structuring experiences which produced it the structuring experiences which affect its structure, brings about a unique integration, dominated by the earliest experiences, of the experiences statistically common to the members of the same class. Thus, for example, the habitus acquired in the family underlies the structuring of school experiences (in particular the reception and assimilation of the specifically pedagogic message), and the habitus transformed by schooling, itself diversified, in turn underlies the structuring of all subsequent experiences (e.g. the reception and assimilation of the messages of the culture industry or work experiences), and so on, from restructuring to restructuring” (Bourdieu, 1997:87).

“Prinsip perbedaan-perbedaan individual ini terletak pada fakta bahwa, sebagai produk dari serangkaian penentuan penataan yang diurutkan secara kronologis, habitus, yang setiap saat menata berdasarkan pengalaman-pengalaman penataan yang menghasilkannya, menghasilkan integrasi yang unik, didominasi oleh pengalaman-pengalaman paling awal, dari pengalaman-pengalaman yang secara statistik umum bagi anggota kelas yang sama. Oleh karena itu, sebagai contoh, habitus yang diperoleh dalam keluarga mendasari penataan pengalaman sekolah (khususnya penerimaan dan asimilasi pesan pedagogis khusus), dan habitus yang diubah oleh persekolahan, yang dengan sendirinya beragam, pada gilirannya mendasari penataan semua pengalaman berikutnya (misalnya penerimaan dan asimilasi pesan industri budaya atau pengalaman kerja), dan seterusnya, dari penataan ulang ke penataan ulang”.

Kemunculan habitus merupakan hasil dari interaksi antara modal dan kelas, yang berkembang secara progresif dalam kehidupan sosial. Habitus kemudian u, pikiran, dan interaksi individu dengan lingkungannya. Kelas-dengan bentuk modal tertentu, akan menunjukkan kebiasaan da pula, menghasilkan variasi dalam praktik sosial di antara Pada akhirnya, habitus dipaksakan oleh kelas dominan kepada indi, 2021).



2.1.2.3. Ranah

konsep ketiga yang penting dalam dominasi sosial adalah Ranah (*Field*). Konsep habitus tidak dapat dipisahkan dari konsep bidang (*field*), karena keduanya memiliki hubungan timbal balik yang erat. Di satu sisi, terdapat struktur objektif, yaitu struktur bidang sosial, dan di sisi lain, terdapat struktur habitus yang telah menyatu dalam domain perilaku. Sementara habitus berada di dalam pikiran aktor, ranah justru berada di luar pikiran mereka (Krisdinanto, 2014). Dengan kata lain, habitus merupakan fondasi yang beroperasi di dalam lapangan sosial. Bourdieu, dalam bukunya *An Invitation to Reflexive Sociology* (2013), mendefinisikan ranah sebagai berikut:

“In analytic terms, a field may be defined as a network, or a configuration, of objective relations between positions. These positions are objectively defined, in their existence and in the determinations they impose upon their occupants, agents or institutions, by their present and potential situation (situs) in the structure of the distribution of species of power (or capital) whose possession commands access to the specific profits that are at stake in the field, as well as by their objective relation to other positions (domination, subordination, homology, etc.)” (Bourdieu, 2013:97).

Dalam istilah analitis, sebuah bidang dapat didefinisikan sebagai jaringan, atau konfigurasi, hubungan objektif antar posisi. Posisi-posisi ini didefinisikan secara objektif, dalam keberadaan dan ketentuan yang mereka bebaskan pada penghuninya, agen atau institusi, oleh situasi (situs) mereka saat ini dan potensial dalam struktur distribusi jenis kekuasaan (atau modal) yang kepemilikannya memerintahkan akses ke keuntungan spesifik yang dipertaruhkan di bidang tersebut, serta oleh hubungan objektif mereka dengan posisi lain (dominasi, subordinasi, homologi, dll.”

Bourdieu berpendapat bahwa tindakan agen tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dalam konteks sosial yang spesifik, yang diatur oleh serangkaian relasi sosial yang objektif. Dalam model teoritisnya, Bourdieu mengembangkan konsep ranah sebagai bagian dari formasi sosial yang tersusun secara hierarkis. Ranah-ranah ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, politik, dan sastra. Setiap ranah memiliki logika dan aturan tersendiri yang mengatur interaksi dan persaingan di dalamnya.

Bourdieu memahami konflik, persaingan, atau pertempuran dalam ranah bukan sebagai sesuatu yang bersifat fisik, melainkan simbolik. Dalam teorinya, ia sering menggunakan istilah kekuasaan simbolik, kekerasan simbolik, dan relasi



elaskan proses regenerasi sosial yang melibatkan agen-agen. Setiap agen memiliki modal dan habitus yang beragam, namun mereka semua berusaha untuk memperoleh posisi dominan dalam ranah tersebut. Ini tidak hanya tentang kepemilikan modal ekonomi, tetapi juga modal simbolik (Bourdieu, 1993).

Ranah juga berperan penting dalam memahami bagaimana individu diperebutkan atau dinegosiasikan untuk memperoleh posisi

kekuasaan. Persaingan dalam ranah sosial tidak hanya mempertahankan perbedaan dan status aktor sosial, tetapi juga berfungsi sebagai sumber kekuasaan (Martono, 2012). Bourdieu menggambarkan logika ini sebagai bentuk permainan hubungan kekuasaan, di mana pemain dengan kepemilikan modal yang besar dapat menentukan posisi mereka di dalam ranah. Agen-agen yang berhasil memenangkan permainan kekuasaan akan menduduki kelas dominan, yang kemudian menentukan tujuan dan mengkondisikan kelas sosial di bawahnya untuk melegitimasi kekuasaan, budaya dan kebiasaan mereka.

Kekerasan juga termasuk dalam ranah kekuasaan, yang mengindikasikan bahwa kekerasan berfungsi sebagai fondasi atau hasil dari relasi kekuasaan. Ketika individu atau kelompok yang memiliki modal mengarahkan kekuatannya kepada pihak yang lebih lemah, pihak yang lemah cenderung mengubah perilaku mereka sebagai respons. Hal ini menggambarkan bagaimana kekerasan muncul sebagai hasil dari pengaruh modal dan kekuasaan. Akibatnya, kekuasaan dan kekerasan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan (Martono, 2012: 39).

Dengan demikian, konsep modal, habitus dan ranah dalam pemikiran Bourdieu memberikan kerangka teoritis yang komprehensif untuk memahami dinamika kekuasaan, persaingan, dan dominasi dalam struktur sosial. Ketiganya saling melengkapi dan menjelaskan bagaimana agen-agen sosial berinteraksi, bersaing, dan mempertahankan posisi mereka dalam berbagai ranah kehidupan.

2.2. Tinjauan Pustaka

2.2.1. Tentang Pengarang

Berikut adalah biografi Amélie Nothomb, pengarang novel *Stupeur et Tremblements*, di situs web <https://www.fondationprincepierre.com>

Stupeur et Tremblements adalah novel autobiografi karya Amélie Nothomb, seorang penulis Belgia yang lahir di Kobé, Jepang pada 13 Agustus 1967. Ayahnya adalah Patrick Nothomb, seorang ambassador Belgia. Masa kecilnya dilewatkan selama lima tahun di desa di pegunungan Shukugawa. Kemudian, ketika Amélie berusia 17 tahun, ia harus mengikuti ayahnya ke China, Amerika, Bangladesh, Burma, Inggris, Laos, dan kembali ke Belgia.

Amélie Nothomb sangat mahir berbahasa asing dan memulai karir menulisnya di tahun 1991 dengan novel "*Hygiène de l'Assassin*" yang meraih penghargaan *Prix René-Fallet* dan *Prix Alain-Fournier*, dan terus berkarya hingga menghasilkan novel "*Stupeur et Tremblements*" yang diterbitkan oleh Albin Michel tahun 1999. Novel ini mendapat penghargaan bergengsi kesusastraan Perancis



Académie Française pada tahun 1999. Berdasarkan wawancara Anne Payot (2018) terhadap Amélie Nothomb, karya *Stupeur et Tremblements* diterjemahkan ke dalam 46 bahasa. Dalam bahasa Inggris, Diana Hunter pada tahun 2001, dicetak oleh St. Martin's Press, *I Fear and Trembling* atau "Takut dan Gemetar".

Nothomb telah diakui sebagai salah satu penulis ternama di dunia. Dalam merajut kata telah membawanya meraih berbagai

penghargaan bergengsi, seperti *Grand Prix du roman de l'Académie française* di tahun 1999, *Grand Prix Jean Giono* dan *Prix de Flore* di tahun 2007. Pengakuan atas prestasinya semakin nyata ketika ia terpilih sebagai anggota Akademi Kerajaan Bahasa dan Sastra Prancis di Belgia di tahun 2015. Karya-karyanya yang memukau terus terbit sejak tahun 1992, dan selalu dinanti-nantikan oleh para pembaca. Berikut beberapa karyanya: *Hygiène de l'assassin* (1992), *Le Sabotage amoureux* (1993), *Les combustibles* (1994), *Les Catilinaires* (1995), *Péplum* (1996), *Attentat* (1997), *Mercure* (1998), *Stupeur et Tremblements* (1999), *Métaphysique des tubes* (2000), *Cosmétique de l'ennemi* (2001), *Robert des noms propres* (2002), *Antéchrista* (2003), *Biographie de la faim* (2004), *Acide sulfurique* (2005), *Journal d'Hirondelle* (2006), *Ni d'Ève Ni d'Adam* (2007), *Le fait du prince* (2008), *Le voyage d'hiver* (2009), *Une forme de vie* (2010), *Tuer le père* (2011), *Barbe bleue* (2012), *La nostalgie heureuse* (2013), *Pétronille* (2014), *Le crime du comte Neville* (2015), *Riquet à la houppe* (2016), *Frappe-toi le cœur* (2017), *Les prénoms épicènes* (2018), *Soif* (2019), *Les aérostats* (2020), *Premier Sang* (2021).

2.2.2. Tanggapan mengenai Novel *Stupeur et Tremblements*

Berikut adalah beberapa tanggapan pembaca untuk novel *Stupeur et tremblements* di situs website *goodreads.com*.

-Federico DN 2023-

"This was greatly enlightening about certain aspects of the Japanese work life, and especially about a western trying to accommodate to their customs. I think the inability to defend yourself, or others, is a free pass to a world of mistreatment. Some very excruciating moments, and a few ones way over the top. Some of it may be overly exaggerated of course, yet sadly I've watched certain movies, heard several things, and even read enough news to know the harsh reality described in this book is partly true, if not completely."

"Hal ini sangat mencerahkan tentang aspek-aspek tertentu dalam kehidupan kerja di Jepang, dan khususnya tentang orang Barat yang mencoba menyesuaikan diri dengan adat istiadat mereka. Saya pikir ketidakmampuan untuk membela diri sendiri, atau orang lain, adalah jalan masuk gratis ke dunia penganiayaan. Beberapa momen yang sangat menyiksa, dan beberapa momen yang terlalu berlebihan. Beberapa di antaranya mungkin terlalu dibesar-besarkan, namun sayangnya saya telah menonton beberapa film, mendengar beberapa hal, dan bahkan membaca cukup banyak berita untuk mengetahui bahwa kenyataan pahit yang digambarkan dalam buku ini

lar, jika tidak sepenuhnya."

atas menjelaskan bahwa budaya kerja di Jepang, seperti yang novel, dapat menjadi sulit bagi orang Barat untuk beradaptasi. Untuk membela diri atau orang lain dalam budaya tersebut membuka peluang perlakuan tidak adil.



-la pacera de laquel-

« Je commence l'année avec un nouvel auteur pour moi, Amélie Nothomb. Un petit roman autobiographique dans lequel elle nous raconte le fonctionnement d'une entreprise japonaise du point de vue d'une occidentale. La différence culturelle entre l'Orient et l'Occident est bien connue, mais au sein de l'entreprise, dans le monde du travail, un peu moins, et ce petit roman est un bon moyen de nous rapprocher de cet abîme qui nous sépare. Il est vrai qu'il se déroule dans les années 90 et que cela a peut-être changé, mais il n'y a pas si longtemps, l'environnement de travail japonais était corseté, fermé, standardisé, hiérarchisé et très, très machiste. »

“Saya memulai tahun ini dengan seorang penulis baru, Amélie Nothomb. Sebuah novel otobiografi pendek yang menceritakan bagaimana sebuah perusahaan Jepang bekerja dari sudut pandang orang Barat. Perbedaan budaya antara Timur dan Barat sudah sangat dikenal, tetapi di dalam perusahaan, di dunia kerja, tidak terlalu banyak, dan novel kecil ini adalah cara yang baik untuk mendekatkan kita pada jurang pemisah yang memisahkan kita. Memang benar bahwa novel ini berlatar belakang tahun 90-an dan mungkin sudah berubah sekarang, tetapi tidak beberapa tahun yang lalu lingkungan kerja di Jepang sangat ketat, tertutup, terstandarisasi, hirarkis, dan sangat, sangat macho.”

Pendapat tersebut menyatakan bahwa novel Amélie Nothomb memberikan wawasan yang berharga tentang cara kerja perusahaan Jepang dari perspektif Barat, menyoroti perbedaan budaya yang mencolok di tempat kerja antara Timur dan Barat.

Dari beberapa kritik menurut pembaca lain, dapat disimpulkan bahwa novel ini menunjukkan bahwa budaya kerja Jepang dapat menjadi sulit bagi orang Barat untuk beradaptasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan budaya dan norma yang ada di kedua negara. Salah satu aspek yang paling menonjol dari budaya kerja Jepang adalah penekanannya pada hierarki dan kepatuhan, yang dapat membuat orang Barat merasa tidak nyaman sehingga terjadinya bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi secara tidak sadar karena adanya kekuasaan di dalamnya. Selain itu, budaya kerja Jepang sering kali menuntut karyawan untuk bekerja berjam-jam dan mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk pekerjaan mereka, yang mungkin tidak sesuai dengan gaya hidup yang diinginkan oleh orang Barat.



elevan

Itang novel *Stupeur et Tremblements* sudah banyak dilakukan, at persamaan dan perbedaan dalam setiap penelitian tersebut. Novel ini telah menjadi objek penelitian berbagai pendidikan. njauan kepustakaan, peneliti menemukan beberapa penelitian penelitian yang dilakukan.

1. Skripsi Ade Inayah pada tahun 2022 yang berjudul “Perempuan dan Kekerasan Dalam *Hygiène De L’assassin* Karya Amélie Nothomb” penelitian ini memiliki persamaan dalam menggunakan teori kekerasan Johan Galtung, menganalisis berbagai macam kekerasan yang terjadi, seperti kekerasan langsung, kekerasan struktural dan kekerasan kultural. Akan tetapi, penelitian ini berbeda dalam fokus kajian tentang kekerasan yang lebih spesifik oleh kekerasan perempuan sedangkan penelitian ini berfokus pada kekerasan seorang imigran dalam perusahaan Jepang dan Penelitian ini juga menggunakan teori Pierre Bourdieu untuk mengungkap bagaimana kekerasan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga terinstitusionalisasi melalui relasi kuasa dalam budaya kerja Jepang yang ada dalam novel *Stupeur et Tremblements*.
2. Skripsi Isna Fatmawati pada tahun 2015 yang berjudul “Wujud Eksistensi Tokoh Utama Dalam Roman Autobiografi *Stupeur et Tremblements* Karya Amélie Nothomb”. Penelitian Fatmawati berfokus pada struktur cerita dan eksistensi tokoh utama. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Fatmawati dalam menggunakan novel *Stupeur et Tremblements* sebagai bahan penelitian, akan tetapi, kedua penelitian ini berbeda dalam fokusnya. Penelitian Fatmawati berfokus pada eksistensi karakter tokoh utama, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan berlandaskan teori eksistensialisme Jean-Paul Sartre, bertujuan untuk mengungkap bagaimana interaksi Amélie dengan lingkungan sosialnya merefleksikan pencarian makna dalam hidupnya. Sedangkan penelitian ini berfokus pada relasi kuasa yang mengakibatkan kekerasan yang dialami oleh tokoh utama, termasuk bagaimana hubungan antara Amélie dan atasannya menciptakan situasi yang penuh dengan tekanan dan konflik. Fokus ini mencakup analisis tentang bagaimana kekuasaan dan kekerasan beroperasi dalam konteks gender dan budaya serta bagaimana individu, seperti tokoh utama dalam novel terdampak oleh penindasan dalam lingkungan kerja. Selain itu, kedua penelitian ini juga berbeda dalam teknik analisis data dan metode penelitian yang digunakan.
3. Peneliti Aufa Hanifah pada tahun 2022 yang berjudul “Kekerasan Budaya Pasca 1965 dalam Novel Pulang dan dari dalam Kubur”. Jurnal ini membahas mengenai kekerasan melalui dua perspektif Johan Galtung dan Pierre Bourdieu. Penelitian ini memiliki persamaan dalam meneliti kekerasan bisa muncul melalui struktur sosial dan budaya namun di sisi lain, penelitian ini berbeda dengan penelitian Aufa Hanifah (2022) berfokus pada perspektif kultural dari Johan Galtung dan modal budaya Pierre Bourdieu untuk mengungkap bentuk kekerasan budaya yang dialami tokoh-novel tersebut. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada kekerasan yang dialami oleh tokoh utama berdarah Belanda, Amélie, dalam konteks budaya yang sangat berbeda, yakni Jepang dalam lingkungan kerja yang didominasi oleh hierarki ketat dan relasi kuasa yang...



4. Peneliti Ni Kadek Arie Cahyani Kepakisan pada tahun 2023 yang berjudul “Strukturasi Kekuasaan & Kekerasan Simbolik Dalam Anak Semua Bangsa Karya Pramoedya: Perspektif Bourdieu” jurnal ini memiliki kesamaan dalam menggunakan teori Pierre Bourdieu untuk memahami relasi kekuasaan yang menciptakan bentuk-bentuk kekerasan. Meski konteks dan objek kajiannya berbeda, kedua penelitian ini menggunakan teori Bourdieu untuk menganalisis bagaimana kekuasaan menciptakan mekanisme kontrol yang mendominasi dan mengendalikan individu dalam struktur sosial tertentu.
5. Peneliti Dani Alfianto pada tahun 2017 yang berjudul “Dominasi Sosial Dalam Novel Max Havelaar Karya Multatuli (Kajian Dominasi Simbolik Pierre Bourdieu)” jurnal ini memiliki kesamaan dalam menggunakan teori Pierre Bourdieu untuk memahami relasi kuasa dalam novel. Namun, terdapat perbedaan dari kedua penelitian tersebut. Penelitian Dani Alfianto membahas dominasi sosial dalam gambaran kolonialisme Belanda, berfokus pada penindasan budaya dan politik terhadap pribumi Indonesia. Sementara itu, novel *Stupeur et Tremblements* membahas kekerasan akibat relasi kuasa dalam budaya kerja Jepang yang hierarkis. Tokoh utamanya, Amélie, menjadi korban kekerasan fisik, struktural, psikologis, dan kultural yang terjadi dalam lingkungan kerja.

Setelah melihat penelitian-penelitian terhadap kekerasan maupun kekuasaan, peneliti menyimpulkan membahas mengenai kekerasan terhadap tokoh utama dalam *Stupeur et Tremblements* karya Amélie Nothomb. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan perspektif Johan Galtung dan Pierre Bourdieu. Perspektif Johan Galtung akan digunakan untuk menganalisis kekerasan sebagai fenomena yang terjadi dalam novel, sedangkan teori Pierre Bourdieu akan membantu memahami bagaimana ketimpangan relasi kuasa sebagai faktor munculnya kekerasan perusahaan Yumimoto dalam novel.

